

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)  
TAHUN 2021**



**Ruko Permata Sriwijaya Blok H-I  
JL. Sriwijaya No. 8B Semarang  
TELEPON: 024 8419055 / 024 8419056**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Tata Kelola Perusahaan merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. PT BPR BKK KOTA SEMARANG menyadari bahwa pentingnya Tata Kelola Perusahaan lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan Tata Kelola Perusahaan sebagai budaya Tata Kelola yang semakin kuat hingga mengakar agar mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT BPR BKK KOTA SEMARANG dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Pelaksanaan Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan Stakeholder, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga Bank dapat tumbuh berkembang dengan baik secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT BPR BKK KOTA SEMARANG pada tahun 2021 telah membawa hal positif bagi Bank untuk dapat terus bertahan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. BPR BKK KOTA SEMARANG memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK – Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR BKK KOTA SEMARANG dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Semarang.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: AGUSTINUS ARI SUSANTO, S.H.
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) merencanakan, menetapkan sasaran, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja, melakukan pembinaan dan pengendalian seluruh unit kerja, memastikan perusahaan menjalankan kepatuhan</li> <li>b) mengambil langkah tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi SKAI, auditor eksternal, OJK dan/atau hasil pengawasan lain</li> <li>c) menyusun dan menyampaikan laporan kepada BI, OJK, Pemegang Saham, Komisaris, dan pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>g) memantau perkembangan lingkungan usaha khususnya perkembangan industri perbankan</li> <li>h) melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya</li> <li>i) melaksanakan pengembangan SDM melalui pelatihan, penilaian prestasi kerja pegawai, kebijakan gaji dan jenjang karir pegawai</li> <li>j) melakukan inovasi dan perbaikan dalam organisasi maupun operasional</li> <li>k) menetapkan kebijakan bila terdapat perubahan produk dan atau suku bunga kredit, tabungan, deposito, tarif jasa lainnya</li> <li>m) melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku</li> <li>o) mendelegasikan wewenang pada bawahannya dalam batas yang diperkenankan dalam peraturan</li> <li>p) menjaga kekayaan dan asset Bank, menjamin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Bank</li> <li>q) memimpin dan mengendalikan Bank agar hidup dan berkembang sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>r) memonitor perkembangan lingkungan khususnya industri perbankan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mengantisipasi dan memberikan petunjuk teknis pada bawahannya</li> <li>s) melakukan inovasi dan perbaikan dalam organisasi maupun operasional untuk meningkatkan pertumbuhan Bank</li> <li>t) menetapkan kebijakan bank dalam pengembangan pegawai, penilaian prestasi kerja bawahan, kebijakan gaji, reward dan punishment</li> </ul>	

	u) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI, OJK, pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan	
2.	Nama	: ENDANG SETYAWATI, S.Pd., M.Si.
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p><b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>a) menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian</p> <p>b) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan</p> <p>c) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK</p> <p>d) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan</p> <p>e) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai</p> <p>f) melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi</p> <p>g) mengkoordinasikan Penyusunan Program Kerja, anggaran dan biaya sesuai dengan kemampuan Bank dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang</p> <p>h) melakukan koordinasi dengan jajaran pengurus Bank atau Otoritas Perbankan</p> <p>i) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKAI dan OJK maupun pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan</p> <p>j) melakukan usulan kepada Direktur Utama tentang pengelolaan SDM, untuk pemenuhan, pengembangan SDM, pengangkatan dan atau pemberhentian pegawai, mutasi yang dilakukan secara efektif</p> <p>k) mendorong dan meyempurnakan Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi, dan memastikannya sebagai pedoman pelaksanaan kerja pegawai, agar dapat berjalan secara optimal</p> <p>l) mengendalikan dan melakukan pengawasan operasional Bank, agar dapat tercapai rencana perusahaan secara efektif dan efisien</p> <p>m) menyusun dan menyampaikan laporan- laporan kepada pihak- pihak yang berkepentingan</p> <p>n) melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan aktiva Bank secara efektif dan efisien</p>	
3.	Nama	: SUHARTONO, S.E., Akt., M.M.
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p><b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b></p> <p>a) mengkoordinasikan penyusunan program kerja, anggaran dan biaya sesuai dengan kemampuan Bank dan rencana jangka pendek dan jangka panjang</p> <p>b) melakukan koordinasi dengan jajaran pengurus BAnk (Dewan Komisaris dan Direksi) dan atau Otoritas Perbankan</p> <p>c) memastikan sasaran Bank bidang pemasaran dapat dicapai terutama portofolio kredit, dana dan pendapatan</p> <p>d) menyusun dan menyampaikan laporan- laporan kepada pihak- pihak yang berkepentingan</p> <p>e) mengendalikan dan melakukan pengawasan operasional Bank, agar dapat tercapai rencana perusahaan secara efektif dan efisien</p>	



<p>f) melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKAI dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan</p> <p>g) melakukan evaluasi hasil kerja yang telah dicapai dan membandingkannya dengan rencana kerja, dan membuat tindakan-tindakan perbaikan bila dipandang perlu</p> <p>h) melakukan monitoring perkembangan lingkungan, khususnya kebutuhan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya</p> <p>i) melakukan evaluasi terhadap produk-produk dan jasa yang dimiliki untuk melakukan inovasi dan perbaikan serta melakukan promosi untuk meningkatkan pangsa pasar</p> <p>j) melakukan monitoring perkembangan portofolio kredit, penghimpunan dana dan memantau perkembangan suku bunga pasar, melakukan analisis, jika diperlukan untuk melakukan perubahan sesuai rencana kerja</p> <p>k) melakukan monitoring dan melakukan tindak lanjut hasil kerja Bidang Pemasaran, baik di Kantor Pusat maupun KPO/Kantor Cabang</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian kekosongan jabatan Komisaris Utama untuk dikomunikasikan secara intensif dengan pemegang saham</li> <li>2. Kekosongan jabatan sesuai Struktur Organisasi baik di pusat maupun cabang agar segera diisi</li> </ol>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: INDRIYASARI, S.E., M.A.P.
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</li> <li>2. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> <li>3. tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas maksimum Pemberian Kredit dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>4. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas</li> <li>5. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama</li> <li>6. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama</li> </ol>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian kekosongan jabatan Komisaris Utama untuk dikomunikasikan secara intensif dengan pemegang saham</li> <li>2. Kekosongan jabatan sesuai Struktur Organisasi baik di pusat maupun cabang agar segera diisi</li> </ol>	

Penjelasan Lebih Lanjut :

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki komite	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
2.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
3.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR tidak memiliki komite	

### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki komite			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUSTINUS ARI SUSANTO, S.H.	Rp0,00	0%
2.	ENDANG SETYAWATI, S.Pd., M.Si.	Rp0,00	0%
3.	SUHARTONO, S.E., Akt., M.M.	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Direksi tidak memiliki saham pada BPR			

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUSTINUS ARI SUSANTO, S.H.			
2.	ENDANG SETYAWATI, S.Pd., M.Si.			
3.	SUHARTONO, S.E., Akt., M.M.			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AGUSTINUS ARI SUSANTO, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ENDANG SETYAWATI, S.Pd., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	SUHARTONO, S.E., Akt., M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, dengan Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham BPR				



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AGUSTINUS ARI SUSANTO, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ENDANG SETYAWATI, S.Pd., M.Si.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	SUHARTONO, S.E., Akt., M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi yang lain, dengan Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham BPR				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	INDRIYASARI, S.E., M.A.P.	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	INDRIYASARI, S.E., M.A.P.			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	INDRIYASARI, S.E., M.A.P.	Tidak ada	Tidak ada	Pemerintah Kota Semarang - Menerima gaji sebagai Kepala Bapenda Pemerintah Kota Semarang
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris sebagai ASN (Kepala Bapenda Kota Semarang) menerima gaji dari Pemerintah Kota Semarang yang merupakan salah satu pemegang Saham				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	INDRIYASARI, S.E., M.A.P.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi BPR, dengan komisaris lain, maupun dengan Pemegang Saham				

**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp269.942.400,00	2	Rp121.833.306,00
2.	Tunjangan	3	Rp674.973.790,00	1	Rp14.804.594,00
3.	Tantiem	3	Rp123.129.257,00	2	Rp34.097.333,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.068.045.447,00		Rp170.735.233,00

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan roda empat (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan dan ditetapkan dalam RUPS			
Dewan Komisaris tidak mendapat fasilitas asuransi kesehatan karena sebagai ASN sudah mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.03 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.16 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.86 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Jumlah Komisaris pada akhir tahun 2021 hanya 1 (satu) orang sehingga rasio gajinya 1:1. Komisaris Utama habis masa jabatan pada bulan Februari 2021 dan belum ada pengisian kembali.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07 Januari 2021	3	Optimalisasi kinerja tahun 2021 di tengah dampak pandemi covid-19
2.	01 Februari 2021	7	1. Evaluasi capaian kinerja tahun 2020 2. Capaian kinerja bulan Januari 2021
3.	08 Maret 2021	4	Hasil pemeriksaan SKAI pada Kantor Cabang Semarang Timur
4.	09 Maret 2021	3	1. Persiapan Undian Tamades 2. Sektorisasi kredit yang mulai bangkit dan yang belum bangkit 3. Pantauan ketat terhadap kredit relaksasi agar tidak menimbulkan kenaikan NPL 4. Penyesuaian tingkat suku bunga simpanan untuk mengurangi cost of fund 5. Meminimalkan dampak penyebaran covid-19 di lingkungan internal salah satunya dengan pengurangan jam kerja
5.	05 Mei 2021	3	1. Kinerja bulan April 2021 yang belum optimal akibat dampak pandemi covid-19 2. Persiapan evaluasi kinerja triwulan II tahun 2021 3. Evaluasi produk kredit untuk memacu angka pertumbuhan kredit

			4. Optimalisasi penanganan kredit macet dan hapus buku
6.	28 September 2021	3	1. Produk stimulan yang dapat mendorong angka pertumbuhan kredit 2. Rencana pengumpulan semua marketing untuk diberikan pengarahannya strategi marketing dan motivasi dalam rangka meningkatkan produksi kredit 3. Pantauan ketat terhadap kredit relaksasi 4. Efisiensi biaya 5. Persiapan RBB tahun 2022 6. Mobil keliling untuk mulai dioperasikan kembali
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</b> Dalam rapat pengurus semua Direksi (3 orang) selalu hadir. Karena Komisaris sejak bulan Februari 2021 hanya 1 orang, maka Komisaris menjalankan rapat dengan Direksi			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	INDRIYASARI, S.E., M.A.P.	2	0	33.333333 33333333%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b> Komisaris hadir dua kali dalam rapat pengurus. Namun diluar acara rapat pengurus Komisaris juga menyempatkan untuk hadir di Kantor BPR BKK Kota Semarang				



## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2021 tidak ditemukan kasus penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Demikian pula pada tahun sebelumnya atau tahun 2020								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Selama tahun 2021 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							

2.						
3.						
Penjelasan Lebih Lanjut :						
Selama tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan						

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 Januari 2021	Sosial	Bantuan isolasi mandiri Covid-19 an. Satriyana dan Sri Wuwuh	Satriyana, Sri Wuwuh	Rp662.900,00
2.	07 Januari 2021	Sosial	Bantuan Covid-19 an Rahman F	Rahman F	Rp170.000,00
3.	12 Januari 2021	Sosial	Bantuan isolasi mandiri Covid-19 an. Wikan dan Maskuri	Wikan, Maskuri	Rp774.400,00
4.	13 Januari 2021	Sosial	Bantuan isolasi mandiri Covid-19 an. Mulyanto dan Nur Yasin	Mulyanto, Nur Yasin	Rp714.900,00
5.	18 Januari 2021	Sosial	Bantuan Covid-19 Cabang Gunungpati	Cabang Gunungpati	Rp693.400,00
6.	19 Januari 2021	Sosial	Bantuan Covid-19 an. Noor Hidayat	Noor Hidayat	Rp900.000,00
7.	20 Januari 2021	Sosial	Bantuan isolasi mandiri penderita Covid-19 Cabang Gunungpati	Illa, Yani, Edi, Noor H, Bambang W	Rp1.101.248,00
8.	26 Januari 2021	Sosial	Bantuan Covid-19 an. Sri Suryani	Sri Suryani	Rp150.000,00
9.	01 Februari 2021	Sosial	Bantuan 100 paket sembako untuk korban banjir di Kecamatan Genuk, Semarang	Korban banjir di Kecamatan Genuk	Rp16.691.300.000,00
10.	02 Februari 2021	Sosial	Bantuan Covid-19 an. Kartika	Kartika	Rp150.000,00
11.	19 Februari 2021	Sosial	Bantuan isolasi mandiri karena terpapar covid 19 an. Suwardi	Suwardi	Rp133.400,00
12.	04 Maret 2021	Sosial	Bantuan Covid-19 di Cabang Genuk	Cabang Genuk	Rp1.650.000,00
13.	13 April 2021	Sosial	Pemberian rompi dan sembako untuk	Petugas parkir	Rp8.650.500,00

			petugas parkir di wilayah Kota Lama, Semarang		
14.	23 April 2021	Sosial	Santunan untuk anak yatim di Kecamatan Semarang Timur	Anak yatim	Rp250.000,00
15.	10 Mei 2021	Sosial	Pemberian 80 paket sembako dan daging sapi untuk penduduk kurang mampu di wilayah Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Banyumanik	Penduduk di Wilayah Semarang Timur dan Banyumanik	Rp20.000.000,00
16.	25 Mei 2021	Sosial	Partisipasi wakaf pembangunan Rumah Tahfidz Qur'an melalui Perbarindo	Rumah Tahfidz Qur'an	Rp5.000.000,00
17.	26 Juli 2021	Sosial	Partisipasi 1 ekor kambing qurban untuk masyarakat wilayah Kecamatan Mijen	Penduduk di Kecamatan Mijen	Rp3.000.000,00
18.	26 Juli 2021	Sosial	Partisipasi 1 ekor kambing qurban untuk masyarakat wilayah Kecamatan Banyumanik	Penduduk di Kecamatan Banyumanik	Rp3.300.000,00
19.	27 Juli 2021	Sosial	Bantuan 100 paket sembako untuk penduduk yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid-19 di wilayah Kecamatan Semarang Barat	Penduduk Semarang Barat	Rp10.000.000,00
20.	07 September 2021	Sosial	Bantuan sembako untuk penduduk yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar covid-19 di wilayah Kecamatan Mijen dan Gunungpati	Penduduk Mijen dan Gunungpati	Rp39.188.000,00
21.	08 September 2021	Sosial	Bantuan pembangunan masjid Al Ittihad	Masjid Al Ittihad	Rp2.500.000,00
22.	14 September 2021	Sosial	Bantuan untuk penyelenggaraan	Penyelenggara Kegiatan	Rp1.000.000,00

			kegiatan Olah Raga di daerah Purwodinatan, Semarang		
23.	25 Oktober 2021	Sosial	Bantuan CSR pengembangan Desa Wisata Kandri, Gunungpati, Semarang	Pokdarwis Pandanaran	Rp25.000.000,00
24.	04 November 2021	Sosial	Sponsorship kegiatan siswa dalam rangka HUT SMP Negeri 21 Semarang	SMP Negeri 21 Semarang	Rp750.000,00
25.	30 November 2021	Sosial	Bantuan pembuatan sekat pembatas lapangan tenis meja di Kecamatan Mijen	Pengurus Gedung Olah Raga	Rp3.888.000,00
26.	07 Desember 2021	Sosial	Bantuan sembako, selimut dan sarung untuk pengungsi akibat letusan Gunung Semeru melalui Basarnas Kota Semarang	Basarnas Kota Semarang	Rp4.280.225,00

**Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank terhadap masyarakat. Progam CSR PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sinergi dan ikatan yang kuat dengan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, agar dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan khususnya di sekitar wilayah operasional Bank, dan secara luas memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Keseluruhan hal tersebut menjadi bagian yang melekat dari tujuan akhir atas penerapan Tata Kelola di PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA).

## BAB III HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)
Alamat	: Ruko Permata Sriwijaya Blok H-I JL. Sriwijaya No. 8B Semarang
Nomor Telepon	: 024 8419055 / 024 8419056
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp35.914.040.812,00
Total Aset	: Rp211.637.208.073,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA) Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.45	0.290
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.04	0.306
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.95	0.195
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.73	0.173
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.35	0.235
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.10	0.158
10	Rencana Bisnis BPR	1.94	0.146
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.85	0.139
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.800</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.45)

Jumlah anggota Direksi PT BPR BKK KOTA SEMARANG 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum yang sekaligus ditunjuk sebagai Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan.

Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, dan hasil pengawasan OJK. Namun masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti sesuai dengan target date yang disepakati.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.04)

Dewan Komisaris PT BPR BKK KOTA SEMARANG semestinya berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. Namun pada bulan Februari 2021 Komisaris Utama telah habis masa jabatannya dan sampai dengan akhir Desember 2021 belum dilakukan pengisian kembali oleh Pemegang Saham.

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu namun belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dengan kehadirannya secara rutin ke Bank untuk mendapatkan informasi dan laporan kegiatan usaha Bank yang disampaikan dari Direksi.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR BKK KOTA SEMARANG belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Benturan kepentingan secara umum diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Surat Keputusan Direksi nomor 061/SKDir/VI-2019 yang secara khusus mengatur penanganan benturan kepentingan antara lain tata cara pengambilan keputusan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.

Saat ini baik Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pejabat Eksekutif menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.95)

PT BPR BKK KOTA SEMARANG sudah menunjuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan namun saat ini masih dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum dan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.73)**

PT BPR BKK KOTA SEMARANG telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern dan telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional.

Satuan Kerja Audit Intern telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Komisaris serta kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)**

PT BPR BKK KOTA SEMARANG telah menugaskan KAP yang penunjukannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan audit dilakukan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.

Akuntan Publik telah bertindak independen dalam melakukan audit dan telah dituangkan dalam hasil audit dan management letter yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.35)**

PT BPR BKK KOTA SEMARANG telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan kepada OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

Bank saat ini telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Manajemen Risiko sekaligus kepatuhan dan APU PPT, namun saat ini masih dirangkap oleh Kepala Bidang SDM dan Umum sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat optimal.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.1)**

PT BPR BKK KOTA SEMARANG senantiasa mematuhi ketentuan terkait dengan BMPK dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.94)**

Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK KOTA SEMARANG disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, ditetapkan dalam RUPS Pemegang Saham dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

Evaluasi Rencana Bisnis Bank dilakukan dalam rapat Direksi dan unit terkait maupun beserta Dewan Komisaris.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.85)**

Laporan keuangan dan non keuangan PT BPR BKK KOTA SEMARANG telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi dan disampaikan kepada pihak-pihak yang ditentukan tepat waktu.

PT BPR BKK KOTA SEMARANG juga telah menyusun Laporan keuangan Publikasi setiap triwulan.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur penerapan Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Struktur penerapan Tata Kelola adalah bahwa untuk mendukung operasional PT BPR BKK KOTA SEMARANG masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Untuk Faktor Positif Aspek Proses penerapan Tata Kelola yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Bank senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif Aspek Proses penerapan Tata Kelola adalah Bank perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Dari sisi Faktor Positif Aspek Hasil penerapan Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Hasil penerapan Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator karena kesalahan dalam pelaporan

SEMARANG, 18 April 2022

**PT BPR BKK KOTA SEMARANG (PERSERODA)**

Menyetujui



**AGUSTINUS ARI SUSANTO**  
Direktur Utama



**INDRIYASARI**  
Komisaris